

## **Khianat Demokrasi**

### **Teuku Kemal Fasya**

Ketika hari pemilu legislatif 9 April 2014 baru saja malam dan hasil seluruh *quick count* menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung memberikan ucapan selamat. Ia tak menunggu hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebulan kemudian.

Bayangkan, SBY memberikan ucapan di hari pertama penghitungan suara hanya berdasarkan perhitungan *quick count*. Padahal secara psikologi, sebagai ketua Partai Demokrat, ia pasti sedang remuk redam karena partainya berada di urutan keempat setelah lima tahun sebelumnya kampiun.

Momen itu memang melambungkan pujian kepada SBY. Secara retorik SBY berulang-kali mengatakan tidak akan melakukan tindakan “inkonstitusional” atau “kudeta” akibat kekalahan pileg dan dengan jiwa besar mempersiapkan pemilihan presiden secara baik dan demokratis. Kekalahan Demokrat itu juga sekaligus mengubur kampanye konvensi calon presiden dari partai lambang berlian itu karena tak memenuhi kuota 25 persen suara pemilih.

### **Terlalu Tua Berubah**

Namun harapan itu sebenarnya terlalu ideal. *Too old to change*, pepatah Amerika menyebutkan. Sikapnya dan partainya pada sidang DPR RI pengesahan RUU Pilkada pada 25-26 September lalu menunjukkan hal sebaliknya. Termasuk juga ketika kita melihat drama rapat paripurna pertama DPR RI baru 1 Oktober lalu, kita semakin melihat bagaimana sesungguhnya alam bawah sadar politik SBY. Watak demokrasi tidak melekat padanya, luruh oleh kontradiksi-kontradiksi akibat syahwat politik Hobbesianistik.

Usulan perubahan UU sebagai sistem pilkada baru yang dipilih oleh DPRD akhirnya disahkan. Pengesahan itu tak lepas dari drama politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang abstain (*walkout*), sehingga ketika dilakukan pemungutan suara, faksi yang mendukung pilkada langsung kalah. Kita juga mendengar pengakuan SBY bahwa ia tak kunjung disambangi oleh Megawati saat rapat penentuan pimpinan DPR. Padahal ada cerita bahwa sesungguhnya SBY yang menolak pertemuan darurat itu.

Terkait aksi RUU Pilkada, sikap Demokrat itu tak bisa dianggap improvisasi Benny K Harman dan Nurhayati Ali Assegaf semata. Menurut pengakuan Ruhut Sitompul, drama *walkout* itu diambil setelah berkonsultasi langsung dengan SBY yang sedang berada di Washington DC, AS. Sangat mustahil mereka berani mengambil sikap tanpa restu “*the big man*”, sang lurah Demokrat. Posisi SBY dalam struktur keorganisasian Demokrat bukan hanya ketua umum, tapi juga ketua dewan kehormatan dan ketua majelis tinggi. Jabatan berlapis itu menunjukkan kuasa yang luar biasa yang dimilikinya dan bisa memerah-hitamkan arah politik partai.

Ironis, sikap SBY ini menjadi bentuk pengingkaran atas kata-katanya sendiri. Melalui pernyataan yang disiarkan di *Youtube* 14 September, SBY menganggap sistem elektoral kepala daerah yang paling baik untuk demokrasi Indonesia saat ini adalah pilkada langsung. Beberapa penyakit pilkada langsung bisa diperbaiki tanpa mengubah sistem kepemiluannya. Pernyataan “pribadi” itu diperkuat pernyataan resmi partai pada 17 dan 18 September, termasuk sikap Fraksi Demokrat pada rapat panja RUU Pilkada 24 September.

Namun semua itu hanya kepalsuan atau dramaturgi yang buruk. Konsep dramaturgi politik - seperti disandarkan sosiolog Irving Goffman yang terinspirasi budaya teaterisme Shakespeare - bukanlah pertunjukan politik diametral antara panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan adalah pementasan di depan publik melalui aktualisasi kebaikan politik dan kesempurnaan gestur, asesoris, dan perwatakan. Adapun panggung belakang adalah latihan dan simulasi untuk tampil baik di panggung depan. SBY dan demokrat telah menjadi sutradara dan dramawan buruk atas penampilan politiknya di depan publik.

Jika kini SBY dianggap penghianat demokrasi lokal karena “menyetujui” pemberlakuan pilkada via DPRD, maka itu bukan sekedar tuduhan hiperbolis yang tak berdasar. Jika direfleksikan atas sikap politik SBY selama ini maka ajeklah julukan itu. Gerakan netizen yang menumpahkan kekesalan dengan membuat tagar di twitter *#ShameOnYouSBY* dan *#ShamedByYou* adalah akumulasi perasaan yang tersimpan cukup lama.

Kepura-puraan bisa disembunyikan dalam kurun tertentu tapi ia tak akan bisa bertahan selamanya dan tidak diketahui publik. Kasus ini jadi momentum untuk mengingat kembali kebijakan tak konsisten SBY dalam mempromosikan demokrasi, seperti pembiaran diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, remisi dan grasi kepada para koruptor, lambannya sikap menyudahi konflik antara KPK dan kepolisian pada kasus Cicak vs Buaya, nepotisme (diistilahkan George Junus Aditjondro: Gurita Cikeas), abstain sikap pada perilaku politik fitnah, dll.

**Akhir Buruk**

Aksi penolakan publik atas pemberlakuan UU Pilkada baru ini sungguh tak terpikirkan dampak politiknya oleh SBY dan Demokrat. Sikap *walkout* karena 10 syarat perbaikan pilkada langsung tidak dipenuhi hanya *simulacra* politik agar tetap dikenang sebagai pejuang demokrasi sekaligus penjaga hati sesama kompatriot di Koalisi Merah Putih. Padahal efek yang ditimbulkan sangat liar dan brutal. Demokrat dan SBY kini harus menanggung stigma sebagai penghianat demokrasi lokal.

Alhasil, lancung ke ujian politik, seumur hidup publik sulit percaya. Kemarahan SBY atas hasil sidang DPR adalah sinetron *stripping* untuk menetralisasi kemarahan publik atas pemberlakuan UU Pilkada baru itu. Bahkan sikap presiden untuk tidak menandatangani UU Pilkada dan rencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tak menumbuhkan simpati dari publik. Di media sosial telah muncul *meme* dua ikon presiden. Gambar Soekarno disimbolkan penyambung lidah rakyat sedangkan SBY diikonkan sebagai pemotong lidah rakyat!

Padahal, sejarah Pilkada langsung tidak dapat dilepaskan dari peran SBY (bersama Jusuf Kalla pada masa pemerintahan pertama). Dimulai pada 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara dan terakhir Pilkada Lampung 9 April 2014. Pilkada telah menjadi model elektoral yang menarik gairah dan partisipasi publik secara massif. Membuatnya mundur hanya akan menimbulkan komplikasi pada struktur dan kultur politik elektoral kita.

Memang ada saja eksekusi yang ditimbulkan seperti politik uang, pilkada berbiaya mahal, dan konflik horizontal. Akan tetapi eksekusi mengembalikan pilkada via DPRD bukan tak sedikit. Bahaya terbesar yang mulai terbayang adalah beralihnya politik transaksional dan subordinasi kekuasaan eksekutif lokal ke dalam *puzzle* politik kepentingan DPRD di mana skenario politiknya berhulu di dewan pengurus pusat (DPP) partai-partai koalisi. Tidak seperti dibayangkan Fadli Zon hanya cukup dengan menyediakan kopi dan teh bagi anggota dewan dan para kandidat. Secara praktis rejim elektoral DPRD akan menjadi percaturan politik uang yang tak tepermenai. Secara gradual proses ini pun akan menggeser langgam konstitusional kita menjadi bercita-rasa parlementeriat.

Jika itu terjadi, maka tepat mengatakan SBY pelopor perubahan fundamental konstitusi kita, dari presidensial menuju parlementer dengan budaya politik Machiavellianistik dan Lenistik. Perkubuan yang terjadi di parlemen saat ini juga bisa dikatakan adalah buah dari “sikap penyeimbang” yang dilakukan partai SBY itu sehingga semakin menumbuhkan antipati jilid II publik kepada DPR era reformasi. Tentu sebuah warisan terburuk dari presiden Indonesia yang dua kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Apakah ini bukan penghianatan demokrasi namanya?

Teuku Kemal Fasya, antropolog politik. Anggota Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).

[www.siperubahan.com](http://www.siperubahan.com), 2 Oktober 2014,